

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DAN MASYARAKAT DI PESANTREN

Muhammad Asmu'i

muhammadasmui205@gmail.com¹

Yuhana Fetri²

yuhanafetri171@gmail.com²

Asmendri³

asmendri@uinmybatusangkar.ac.id³

Milya Sari⁴

milyasari@uinib.ac.id⁴

^{1,2,3}UIN Mahmud Yunus Batusangkar

⁴UIN Imam Bonjol Padang

ABSTRACT

School and community-based education in Islamic boarding schools is an educational model that integrates formal learning at school with non-formal education in the Islamic boarding school community. This model aims to produce graduates who are intellectually, spiritually and emotionally balanced, and have adequate life skills to face the challenges of life in the global era. School-based education and Islamic boarding school communities are potential educational models to be developed in Indonesia. This model can be a solution to improve the quality of education in Indonesia, especially in rural areas.

Keywords: *School-Based Management, Community-Based Management, Islamic Boarding Schools.*

ABSTRAK

Pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat dipondok pesantren merupakan model pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran formal disekolah dengan pendidikan non formal dimasyarakat pesantren. Model ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki intelektual, spritual dan emosional yang seimbang, serta memiliki keterampilan hidup yang memadai untuk menghadapi tantangan kehidupan di era gobaal. Pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat dipesantren merupakan model pendidikan yang potensial untuk dikembangkan diindonesia. Model ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia khususnya diwilayah pedesaan.

Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Manajemen Berbasis Masyarakat, Pesantren.

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan berupaya mendidik manusia untuk mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dia akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya itu untuk kebaikan masyarakat, lingkungan, dan bangsanya. Tuntutan pengembangan sumber daya manusia semakin meningkat, maka layanan pada pendidikan haruslah mampu mengikuti dan mengimbangi perkembangan tersebut. Selain keluarga dan lembaga pendidikan, masyarakat sangat memiliki peran yang penting terhadap pendidikan.

Merujuk pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu keharusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Di sisi lain Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menunjukkan tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa

Sejarah pendidikan di Indonesia telah memberikan bukti bahwa pendidikan yang berbasis masyarakat

mempunyai daya tahan yang luar biasa, karena di dukung oleh masyarakat yang merasa memilikinya, pondok pesantren adalah sebuah bukti nyata.

Namun mengembalikan kekuatan masyarakat yang telah di abaikan begitu lama tidaklah mudah. Paradigma lama telah mengaburkan pikiran mengenai pendidikan yang selayaknya. karena kita harus beralih ke sebuah paradigma reformasi yang baru dan mungkin gagasan pendidikan berbasis masyarakat dapat dijadikan sebuah titik masuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pendidikan Berbasis Sekolah

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “school-based management”. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Menurut Edmond yang dikutip Suryosubroto merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah (Suharto 2013). Nurcholis mengatakan Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Aziz 2015).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di Amerika Serikat, konsep Site Based Management merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran pendidikan, sumberdaya pendidik, kurikulum dan evaluasi pendidikan

(penilaian). Demikian juga studi yang dilakukan di El Salvador, Nepal dan Pakistan. Rata-rata informasi menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah telah meningkatkan motivasi dan kehadiran guru.

Sementara di Australia, School Based Management merupakan refleksi pengelolaan desentralisasi pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut visi, misi, dan tujuan atau sasaran sekolah yang membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum sekolah dan program-program operatif sekolah yang lain. MBS di Australia dibangun dengan memperhatikan kebijakan dan panduan dari pemerintah negara bagian di satu pihak, dan di pihak lain dari partisipasi masyarakat melalui school council dan parent and community association. Perpaduan keduanya melahirkan dokumen penting penyelenggaraan MBS yaitu school policy yang memuat visi, misi, sasaran, pengembangan kurikulum, dan prioritas program, school planning review serta school annual planning quality assurance. Akuntabilitas dilakukan melalui external and internal monitoring (Suharto 2013).

Dalam Pasal 11 UU No.25 Tahun 1999, kewenangan daerah kabupaten dan kota, mencakup semua bidang pemerintahan termasuk di dalamnya pendidikan dan kebudayaan, maka terdapat otonomi dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan yang mengarah kepada pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkeadilan(Widyanto 2019).

Tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah secara umum adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang mana segala hal yang terkait di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada keterlibatan atau campur tangan negara (pemerintah). Masyarakat mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraannya. Model Pendidikan berbasis masyarakat merupakan tawaran terhadap mainstream pendidikan yang berbasis negara. Praktek pendidikan berbasis masyarakat telah lama ada sejak kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, walaupun secara konseptual model pendidikan berbasis masyarakat belum diformulasikan secara baku saat itu. Secara khusus Azra yang dikutip Toto

menyebutkan, di kalang-an masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari rangkang, dayah, meunasah (Aceh), surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), bustanul atfal, diniyah dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim.

Dalam pendidikan berbasis masyarakat, masyarakatlah yang menjadi tuan atau pemilik di rumahnya sendiri. Pihak lain dalam hal ini pemerintah hanya bisa menjadi mitra atau rekan yang berfungsi untuk memfasilitasi, mendanai, atau mendampingi segala kegiatan yang ada kaitannya dengan pendidikan berbasis masyarakat, tanpa ada unsur memaksakan kepentingan. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang dalam masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup(Dr. Vladimir 2017). Pendidikan berbasis masyarakat merupakan wujud dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya sendiri melalui pendidikan yang

dikembangkan oleh masyarakat. Pada aspek tertentu Pendidikan berbasis masyarakat hanya dapat eksis dan berjalan dengan baik manakala suasana kehidupan yang demokratis telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta masyarakat mampu dan memiliki kesadaran pentingnya pemberdayaan.

Dalam konteks kepemilikan, Pendidikan berbasis masyarakat dianggap sebagai berbasis masyarakat jika segala hal yang terkait di dalamnya berada di tangan masyarakat, seperti perencanaan hingga pelaksanaan. Sebaliknya, jika semua penyelenggaraan pendidikan ditentukan pemerintah maka disebut pendidikan berbasis pemerintah atau negara (state-based education) atau jika semuanya ditentukan oleh sekolah maka disebut pendidikan berbasis sekolah (school-based education). Penulis melihat bahwa Pendidikan berbasis masyarakat lebih berorientasi pada keterlibatan atau peran masyarakat dalam pendidikan yang dikelolanya. Untuk mengaitkannya dengan pembelajaran yakni dalam konteks teori pembelajaran, Pendidikan berbasis masyarakat dapat mengakomodasi berbagai teori-teori pembelajaran. Teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence), belajar sosial (social learning), dan sebagainya, dapat diterapkan dalam pendidikan berbasis masyarakat.

Tujuan pendidikan berbasis masyarakat biasanya mengarah pada isu-isu masyarakat seperti pelatihan

karir, perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, penanganan masalah kesehatan, dan sebagainya.

Tujuan pendidikan berbasis masyarakat hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang unggul dalam segala bidang. Melalui pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat diberdayakan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Menurut E. Muyasa hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak,
- 2) Memperkukuh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat,
- 3) Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Sementara implikasi Pendidikan berbasis masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri adalah:

- a) Masyarakat diberdayakan,
- b) Masyarakat diberi peluang untuk mengembangkan kemampuan
- c) Masyarakat diberi kebebasan mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola, dan menilai diri.

Pendidikan Berbasis Masyarakat Dipesantren

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan, maka pesantren dapat memperhatikan dari tiga sisi:

Pertama: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling)

Kedua: memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering)

Ketiga: memberdayakan mengandung pula arti melindungi. dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta ekspliotasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan dari usaha sendiri. Dengan demikian, tujuan akhir adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Kemudian dalam pemberdayaan masyarakat, setidaknya pesantren memiliki peran sebagai berikut:

Pertama: penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kedua: pondok pesantren sebagai aset masyarakat yang dapat mengakses perubahan mandiri.

Ketiga: output pondok pesantren memiliki kemandirian kiranya juga cukup relevan dengan proses pengembangan masyarakat, terutama di era desentralisasi saat ini.

Jadi sebagai lembaga pendidikan islam, pesantren tidak hanya memiliki peran dibidang keagamaan saja, melainkan bidang kehidupan lainpun juga tersentuh oleh pesantren

KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang mana segala hal yang terkait di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada keterlibatan atau campur tangan negara (pemerintah). Masyarakat mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraannya. Model

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan tawaran terhadap mainstream pendidikan yang berbasis negara.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pesantren dapat memperhatikan dari tiga sisi: Pertama: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) Kedua: memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) Ketiga: memberdayakan mengandung pula arti melindungi. dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Ahmad Zaini. 2015. "Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah." *El-Tarbawi* 8(1):69-92. doi: 10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art5.
- Dr. Vladimir, Vega Falcon. 2017. *Manajemen Pendidikan*. Vol. 1.
- Hamid, Hamid. 2018. "Manajemen Berbasis Sekolah." *Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam* 1(1):87-96. doi: 10.24256/jpmipa.v1i1.86.
- Masduki, Moh. 2019. "Pendidikan Berbasis Masyarakat Dalam Pendidikan Islam." *Qalamuna* 11(2):111-23.

Suharto, Toto. 2013. *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*.

Widyanto, I. Putu. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)." *Jurnal Satya Sastraharing* 03(02):93-112.

Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan

Hasbullah, Otonomi Pendidika: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007